

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUK HAK CIPTA
ATAS TARI TRADISIONAL DI SURAKARTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

RHEZA FEBRIAN PRAMUDITA PUTRA

C.100.130.260

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TARI
TRADISIONAL DI SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

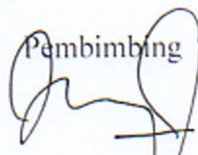
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RHEZA FEBRIAN PRAMUDITA PUTRA

C100130260

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing


(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TARI
TRADISIONAL DI SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

RHEZA FEBRIAN PRAMUDITA PUTRA

C100130260

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 09 Mei 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H, M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, SH.MH
(Anggota I DewanPenguji)
3. Septarina Budiwati S.H. M.Kn
(Anggota II DewanPenguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum.)

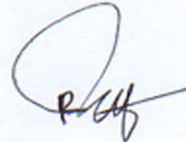
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Mei 2019

Penulis



Rheza Febrian Pramudita P.
C100130260

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TARI TRADISIONAL DI SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Abstrak

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bisa memberikan perlindungan hukum terkait hak cipta atas karya seni tradisional dan peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi karya seni tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional di Surakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta atas karya seni tradisional. Metode penelitian menggunakan metode Pendekatan yuridis empiris, sumber data Primer dan Sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan wawancara, menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam hal perlindungan terhadap sanggar tari dan paguyuban kesenian telah mampu memberikan perlindungan yang sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan bentuk memberikan nomor induk pada sanggar tari dan paguyuban kesenian. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Dinas Kebudayaan Kota Surakarta dapat dilihat dari faktor internal maupun eksternal.

Kata kunci: Hak Cipta, Perlindungan, Tari Tradisional

Abstract

With the birth of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, it can provide legal protection regarding copyright to traditional art works and the role of the Indonesian government in providing legal protection for traditional artwork. This study aims to determine the implementation of copyright legal protection for traditional dance in Surakarta based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, knowing the obstacles faced by the government in an effort to protect the copyright of traditional artwork. The research method uses an empirical juridical approach, primary and secondary data sources, data collection techniques used through literature studies and interviews, using qualitative data analysis. The results of the study show that the implementation in terms of protection of dance studios and art groups has been able to provide protection in accordance with Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, with the form of providing a parent number to dance studios and art groups. The obstacles faced by the government of the Surakarta City Cultural Service can be seen from internal and external factors.

Keywords: Copyright, Protection, Traditional Dance

1. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki akal budi dan pikiran yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, dimana hasil ciptaan atas karya seni tersebut harus dihormati dan dihargai sebagai suatu karya cipta yang merupakan ekspresi dari kemampuan berkarya si pencipta tersebut. Dalam perkembangannya, karya cipta hasil kreasi seorang manusia atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya seni tersebut harus dilindungi dan memiliki hak cipta atas karyanya sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak bagi si pencipta karya seni tersebut.¹ Sebagai suatu karya seni tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka perlindungan Hak Cipta atas karya tradisional suatu daerah akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu: *"Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya"*.

Oleh karena itu semua bentuk pengetahuan tradisional baik cerita, legenda, dan pengetahuan lain semuanya meskipun termasuk objek HKI akan tetapi semua orang dapat mencontoh, memakai ataupun meniru produk-produk di atas tanpa merasa perlu membayar sejumlah royalti terhadap seseorang yang dianggap sebagai penciptanya, terkecuali bagi warga Negara asing yang ingin mengembangkan diharuskan untuk mendapatkan izin (lisensi) dari Negara asal seni tersebut. Karya seni merupakan salah satu perwujudan kreasi manusia melalui akal budinya mengkespresikan sesuatu keindahan yang ia lihat dan rasakan dalam hatinya, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk suatu karya nyata, misalnya lagu, puisi, gerakan tubuh (tari) yang indah dan karya cipta yang lainnya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Untuk tari tradisional klasik memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan

¹ Emma Valentina Teresha Senewe, 2015, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, Hlm. 12

Yang Dilindungi. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: (1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; (2) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; (3) Gerak, mencakup antara lain, tarian; (4) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (5) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; (6) Upacara adat. Contoh dari tari tradisional klasik antara lain, Tari Bedhaya, Tari Srimpi, dan juga Tari Gambyong. Untuk tari tradisional kreasi baru memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf e. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, bahwa drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim merupakan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contoh dari tari tradisional kreasi baru antara lain Bocah Ethes yang di ciptakan oleh Sanggar Tari Soeryo Sumirat yang ada di Surakarta.

Berbicara mengenai model perlindungan seni tari berarti berbicara mengenai undang-undangnya.² Dalam hal ini rencana untuk melindungi suatu karya cipta dari ekspresi budaya tradisional, dengan kata lain suatu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di bidang seni tari. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang dilakukan dengan cara membuat data base kekayaan tersendiri. Nanti disiarkan ke internet agar semua orang tahu (kesenian tradisional itu) asalnya Indonesia, siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangi kalau mau belajar, itu cara melindunginya.³ Adanya Undang-undang No.

² Rio Candra K, dan Absori, 2016, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal.10

³ Abdul Atsar, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 294.

5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Dalam Pasal 1 Angka (3) UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Persoalan inilah yang kemudian menarik untuk diteliti bagi perkembangan ilmu hukum. Bagaimana kemudian negara memberikan perhatian dan perlindungan terhadap objek kajian tersebut.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini *pertama*, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional di Surakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta? *Kedua*, Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta atas karya seni tradisional?.

2. METODE

Metode yang digunakan penulis adalah Metode pendekatan yuridis normatif karena pendekatan ini mengkaji konsep normatif atau yuridis mengenai Pelaksanaan perlindungan Hukum Hak Cipta atas tari tradisional di Surakarta berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif bermaksud untuk menggambarkan secara jelas, mengenai berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mendeskripsikan mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta atas tari tradisional di Surakarta berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional di Surakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional di Surakarta dapat penulis ketahui dari beberapa pihak yang berkompeten dan mengetahui tentang tari tradisional yang ada di Surakarta, seperti yang telah

diperoleh dari beberapa hasil wawancara yang *pertama*, wawancara kepada bapak Joko yaitu selaku dosen ISI. *Kedua*, wawancara dengan bu Indah (sanggar tari Semarak Candrakirana). *Ketiga*, wawancara dengan Ibu Esti (Dinas Kebudayaan Surakarta). *Ke-empat*, wawancara dengan Bapak Trisno selaku ketua sanggar tari Soerya Sumirat. Berdasarkan wawancara dengan keempat narasumber tersebut, menarik kesimpulan bahwa di Surakarta sendiri memang belum ada tari yang didaftarkan hak ciptanya karena tanpa adanya hak cipta masyarakat telah mengetahui siapa pemilik dan pencipta dari tarian yang melekat di masyarakat. Warisan budaya pada dasarnya mengandung nilai kearifan lokal yang sangat tinggi sudah seharusnya mendapat perhatian serius untuk dilindungi dan dilestarikan oleh semua pihak. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan seluruh elemen masyarakat juga dituntut berkontribusi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap HKI khususnya Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: Pasal 1

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 telah secara jelas menggambarkan karya seni apa saja yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta, seperti perlindungan terhadap tradisional klasik diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut: (a) Untuk tari tradisional klasik memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: (1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; (2) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; (3) Gerak, mencakup antara lain, tarian; (4) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (5)

Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; (6) Upacara adat. Contoh dari tari tradisional klasik antara lain, Tari Bedhaya, Tari Srimpi, dan juga Tari Gambyong. (b) Untuk tari tradisional kreasi baru memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf e. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, bahwa drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim merupakan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contoh dari tari tradisional kreasi baru antara lain Bocah Ethes yang di ciptakan oleh Sanggar Tari Soeryo Sumirat yang ada di Surakarta.

Perlindungan hukum dengan adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya sekaligus memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan juga ada sanksi bagi para pihak yang melanggar peraturan tersebut. Meskipun demikian pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena kurangnya pemahaman dari seniman tari. Salah satu cara untuk melindungi ciptaanya dengan mendaftarkannya meskipun pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, karena timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada/terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaanya.

Pemerintah di Surakarta dalam hal perlindungan hukum terhadap tari tradisional sendiri memang masih kurang dalam hal sosialisasi karena masih jarang dan bahkan belum ada tarian di Surakarta yang didaftarkan hak ciptannya tetapi pemerintah dalam hal perlindungan terhadap sanggar tari dan paguyuban kesenian telah mampu memberikan perlindungan yang sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, yaitu dengan memberikan nomor induk pada sanggar tari dan paguyuban kesenian.

3.2 Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Upaya Melindungi Hak Cipta atas Karya Seni Tradisional

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya seni tradisional dilindungi dan dipegang oleh negara. Namun sayangnya belum adanya peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang seni tradisional tersebut menyebabkan tidak jelasnya perlindungan hukum yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia dan bagaimana mekanisme negara sebagai pemegang hak cipta atas karya seni tradisional. Hal tersebut memberikan kesan bahwa pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni tradisional, sedangkan di lain pihak telah banyak pihak asing yang mendaftarkan hak cipta kekayaan intelektual tradisional yang dianggap produk asli Indonesia di negara mereka. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi kebudayaan nasional, khususnya seni tari tradisional yang ada, sampai saat ini baru dalam tahap inventarisasi. Inventarisasi ini diperoleh berdasarkan data-data dari Pemerintah Daerah setempat atau institusi yang berkompeten dalam hal ini. Sedangkan upaya pemerintah dalam rangka perlindungan hukum terhadap folklor dan hasil kebudayaan rakyat melalui perangkat peraturan daerah dalam rangka perlindungan hukum terhadap karya seni tradisional dan hasil kebudayaan rakyat selama ini baru berupa gagasan yang tidak ditindaklanjuti, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi hak cipta tentang seni tari tradisional selama ini hanya sebatas pelestarian, pembinaan, dan pengembangan dari karya seni tradisional tersebut.⁴

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Dinas Kebudayaan Kota Surakarta dalam upaya untuk mewujudkan bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diidentifikasi dan atau dilihat dari faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor tersebut sebagai berikut: *Pertama*, Faktor Internal. Faktor internal adalah kendala-kendala yang muncul dari pihak masyarakat di Kota Surakarta

⁴ Emma Valentina Teresha Senewe, 2015, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, Hlm 20.

sendiri, adapun kendala-kendala tersebut antara lain, (1) Pemahaman komunitas seni tari tentang hak cipta yang masih lemah sehingga banyak masyarakat bahkan pencipta suatu seni tidak mendaftarkan karya seninya. Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang ternyata belum dinikmati secara ekonomi atas hasil dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Masyarakat lokal tidak menyadari bahwa pengetahuan seni tradisional mereka di bidang mempunyai nilai ekonomis. Mereka pahami adalah bahwa siapa saja boleh memanfaatkan pengetahuan tradisional. Masyarakat juga tidak memahami konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI), apalagi menggunakannya. Tidak jelasnya posisi seni Tradisional di dalam HKI dan kurang-tahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum atas seni Tradisional, menyebabkan banyaknya masyarakat terutama yang terlibat dalam kegiatan seni tradisional tersangkut masalah hukum. Pemerintah harus melakukan segala macam cara guna memberikan perlindungan hukum bagi pelaku Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) di Indonesia atau produk-produk berbasis hak komunal dengan adanya pengetahuan tradisional yang ada di wilayah Indonesia, sehingga kepemilikannya tidak dapat diklaim dan bahkan dimanfaatkan secara ekonomi tanpa izin oleh negara lain. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan jaminan pengembangan produk yang dimiliki oleh setiap daerah yang lebih kompetitif dan berkelanjutan tanpa mengabaikan kearifan lokal, mencegah penggunaan klaim kepemilikan produk-produk tersebut yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin, dan memastikan seluruh masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia yang mengembangkannya bahwa ke depan mereka akan memperoleh manfaat baik secara ekonomi maupun non-ekonomi secara layak. (2) Kesadaran hukum masyarakat terkait hak cipta masih kurang. Negara berupaya untuk memberikan perlindungan hukum atas tari tradisional agar tidak terjadi penyalahgunaan atas Hak Cipta tari tradisional. Perlindungan hukum dan pelestarian tari tradisional dilakukan tidak hanya oleh negara (dalam hal ini Pemerintah) tetapi juga oleh masyarakat, negara memberikan perlindungan dengan membuat peraturan yang mengatur ketentuan tersebut, yang terdapat di dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002.

Faktor Eksternal, Adapun faktor eksternal yang paling nampak adalah mengenai pengaturan UUHC Tahun 2014 masih belum memasyarakatkan. Salah satu contohnya disampaikan oleh bapak Trisno (ketua sanggar soeryo sumirat) yaitu alasan pencipta tidak mendaftarkan hak ciptanya masih terkendala dengan persyaratan yang ribet, dan nilai ekonomi yang tidak seberapa. Ada beberapa kendala lagi yang harus dihadapi yang mengakibatkan belum efektifnya pengaturan tentang perlindungan hukum atas seni tradisional di Indobesia, seperti biaya mahal (pendaftaran dalam negeri dan luar negeri, pemeliharaan, konsultan HKI), perlu SDM yang andal dalam memahami HKI, tempat pendaftaran jauh (Kantor HKI yang berlokasi di Tangerang), dan belum ada pembagian peran secara jelas bagi pemangku kepentingan di bidang HKI.

Kondisi pelaksanaan hukum hak cipta di Kota Surakarta yang memiliki kendala yang cukup kompleks baik menurut faktor secara internal maupun eksternal, harusnya ada suatu langkah untuk memperkuat kedudukan dari UUHC Tahun 2014 di Kota Surakarta. Dimana supaya pelaksanaan UUHC Tahun 2014 lebih efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kota Surakarta. Dengan begitu langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam faktor internal, dapat dilakukan upaya sebagai berikut: (1) Memberikan sosialisasi kepada para masyarakat atau pencipta di Kota Surakarta untuk meningkatkan kesadaran hukum dan arti pentingnya hak cipta yang menjadi hak mereka di atas orang-orang asing yang selama ini tidak mereka rasakan, yakni dengan cara menjabarkan yang lebih tegas dan luas mengenai HKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya sehingga dapat memacu tekad pencipta seni tradisional di Kota Surakarta untuk melebarkan sayap tingkat internasionalnya. (2) Mengayomi pencipta seni di Surakarta untuk menunjang/ mendukung keberadaan dalam pelaksanaan UUHC 2014, kondisi ini dapat dipacu dengan adanya bentuk penyadaran-penyadaran mengenai arti penting keberadaan seni tari tradisional, dalam arti mengenai perlindungan hukum yang didapatkannya serta keuntungan atas keberadaan hak cipta tari tradisional yang dipegang oleh negara dan memberikan pengertian-pengertian bagi masyarakat asing haruslah ijin terhadap pemerintah atas penggunaan tari tradisional. (3) Inventarisasi merupakan

salah satu langkah *Defensive Protection* (perlindungan defensif) yaitu perlindungan tari tradisional tidak ditujukan untuk melindungi sebagaimana yang berlaku di sistem HKI. Perlindungan secara defensif hanya dimaksudkan sebagai upaya agar tidak terjadi penggunaan secara melawan hukum terhadap tari tradisional tertentu. Langkah yang dilakukan dapat dilakukan adalah dengan membuat database yang berkaitan dengan tari tradisional. Database ini dapat dipergunakan sebagai proses akhir inventarisasi yang kemudian didokumentasikan atau dimasukkan secara sistematis di dalam sebuah database.⁵ Proses inventarisasi juga harus melibatkan berbagai kalangan masyarakat dan juga Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai motor penggerak penentu kebijakan bagi kebudayaan daerahnya sendiri. Strategi yang dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing sehingga proses inventarisasi ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja.⁶ (4) *Distribution right*, hak ini bertujuan untuk memberikan hak kepada pencipta untuk menyebarluaskan hasil ciptaannya agar dikenal luas oleh masyarakat.⁷ Ini menjadi salah satu langkah pencipta dalam melakukan perlindungan bagi ciptaannya sendiri. Begitupun tari tradisional langkah ini juga dapat dilakukan, melalui pemerintah asal tarian tersebut, dengan memperkenalkan tarian dan menyebarluaskan tarian tersebut maka masyarakat akan mengetahui asal dari suatu tarian, karena dalam hal ini negaralah yang memegang Hak Cipta atas folklor, tari tradisional. Selain dapat memperkenalkan tari tradisional langkah ini juga dapat memberikan keuntungan bagi negara yang dalam hal ini bertindak sebagai pemegang Hak Cipta. (5) Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian kebudayaan nasional. Salah satu usaha pemerintah yang harus dilakukan adalah dengan menampilkan kebudayaan-kebudayaan daerah disetiap event atau pertunjukan, misalnya tari-tarian, lagu daerah dan sebagainya. Semua itu harus dilakukan sebagai upaya pengenalan kepada generasi muda bahwa budaya yang

⁵ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 146

⁶ *Ibid*, hlm. 137-155.

⁷ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 4.

ditampilkan itu adalah warisan dari leluhurnya. Terlebih pada era globalisasi ini, disadari atau tidak generasi muda saat ini kurang peka, kurang memperhatikan dan kurang tertarik terhadap kebudayaan nasional, yang sebenarnya membutuhkan peranan mereka sebagai generasi penerus untuk tetap melestarikan kebudayaan nasional.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional di Surakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada dasarnya perlindungan terhadap tradisional klasik maupun tari kreasi baru sudah diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut: (a) Untuk tari tradisional klasik memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: (1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; (2) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; (3) Gerak, mencakup antara lain, tarian; (4) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (5) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; (6) Upacara adat. Contoh dari tari tradisional klasik antara lain, Tari Bedhaya, Tari Srimpi, dan juga Tari Gambyong. (b) Untuk tari tradisional kreasi baru memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf e. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, bahwa drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim merupakan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contoh dari tari tradisional kreasi baru antara lain Bocah Ethes yang diciptakan oleh Sanggar Tari Soeryo Sumirat yang ada di Surakarta. Ketentuan

tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur perlindungan hukum dengan adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya sekaligus memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan juga ada sanksi bagi para pihak yang melanggar peraturan tersebut. Meskipun demikian pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena kurangnya pemahaman dari seniman tari. Salah satu cara untuk melindungi ciptaanya dengan mendaftarkannya meskipun pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, karena timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada/terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaanya.

Kedua, Kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta atas karya seni tradisional. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kota Surakarta dalam upaya untuk mewujudkan bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diidentifikasi dan dilihat dari faktor internal maupun eksternal. Faktor Internal antara lain pemahaman komunitas seniman tari tentang hak cipta yang masih lemah sehingga banyak masyarakat bahkan pencipta tari tidak mendaftarkan karya seninya dan kesadaran hukum komunitas seniman tari terkait hak cipta masih kurang. Faktor Eksternal yang paling nampak adalah kurangnya sosialisasi mengenai UUHC Tahun 2014 oleh aparat yang berwenang bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada masyarakat seniman tari. Salah satu contohnya disampaikan oleh bapak Trisno (ketua sanggar Soeryo Sumirat) yaitu alasan pencipta tidak mendaftarkan hak ciptanya masih terkendala dengan persyaratan yang ribet, dan nilai ekonomi yang tidak seberapa. Ada beberapa kendala lagi yang harus dihadapi yang mengakibatkan belum efektifnya pengaturan tentang perlindungan hukum atas seni tradisional di Indobesia, seperti biaya mahal (pendaftaran dalam negeri dan luar negeri, pemeliharaan, konsultan HKI), perlu SDM yang andal dalam memahami HKI, tempat pendaftaran jauh (Kantor HKI yang berlokasi di Tangerang), dan belum ada pembagian peran secara jelas bagi pemangku kepentingan di bidang HKI.

4.2 Saran

Pertama, kepada Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Surakarta, agar terwujudnya perlindungan hukum sesuai dengan tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan upaya mengubah pandangan masyarakat dari *res communis* menjadi *res nullius* terhadap hak cipta melalui politik pemerintah dan pemerintah juga dapat memberikan sosialisasi lebih dalam lagi mengenai Undang-Undang serta pentingnya mendaftarkan Hak Cipta atas ciptaanya.

Kedua, terhadap Seniman dan Masyarakat, berkarya itu sangatlah penting tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mengurus status hukumnya, agar hak kita dapat terjamin. Demikian pula, tidak ada salahnya menikmati karya orang lain, selama kita tidak mengabaikan hak-hak penciptanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, Abdul, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Candra K, Rio dan Absori, 2016, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lutviansori, Arif, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Retno Dumilah, Awwngi, 2015, *Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Valentina Teresha Senewe, Emma, 2015, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.